

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, PENDIDIKANDAN
TEKNOLOGI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2018-2020)**

Nikko Rahmat Saputro, Dr. Banu Witono, S.E., M.Si., Ak., CA

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja modal, pendidikan, dan teknologi terhadap indeks pembangunan manusia. Populasi dalam penelitian ini adalah LKPD provinsi se-Indonesia dengan menggunakan *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel didapatkan 99 LKPD provinsi Indonesia selama tahun 2018-2020 yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Untuk analisa data digunakan analisis regresi berganda dan uji sobel dengan bantuan *software* SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendidikan, dan teknologi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan, belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci: dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja modal, pendidikan, teknologi, indeks pembangunan manusia

Abstract

This study aims to find empirical evidence of general allocation funds, special allocation funds, profit sharing funds, capital expenditures, education, and technology on the human development index. The population in this study were provincial LKPDs throughout Indonesia. Using purposive sampling as the sampling method, 99 Indonesian provincial LKPDs were found during 2018-2020 which were used as research samples. For data analysis, multiple regression analysis and Sobel test were used with the help of SPSS software. The results of this study indicate that general allocation funds, special allocation funds, profit sharing funds, education, and technology have an effect on the human development index. Meanwhile, capital expenditure has no effect on the human development index.

Keywords: general allocation fund, special allocation fund, profit sharing fund, capital expenditure, education, technology, human development index

1. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat (PBB, 1990). Pembangunan manusia telah diakui sebagai salah satu faktor utama kekayaan bangsa, karena merupakan suatu metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana dapat dilihat dari beberapa komponen diantaranya yaitu kesehatan, pengetahuan, dan pengeluaran perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun sebagai salah satu dari indicator alternatif selain pendapatan nasional per kapita untuk menilai keberhasilan pembangunan yang

dilaksanakan oleh suatu negara. Berdasarkan IPM yang telah disusun, maka bisa ditetapkan kelompok negara. Pertama, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah jika IPM-nya kurang dari 50. Kedua, negara dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika IPM-nya antara 50 sampai 80. Ketiga, negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi jika IPM-nya lebih dari 80. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik.

Konsep Indeks Pembangunan Manusia telah dianut di Indonesia yang tertuang pada RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) (Harahap, 2011). Pencapaian tujuan pembangunan manusia di Indonesia pada pemenuhan pendidikan universal, peningkatan kesehatan dan pemberantasan kemiskinan. Pertumbuhan nilai IPM di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun walaupun masih kategori sedang, dibandingkan dengan negara lain Mirza (2011). Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin meningkat.

Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dapat berpengaruh melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah itulah yang dapat mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya.

Dalam konteks Indonesia, komitmen pemerintah dalam membangun IPM sebagai amanah Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dijabarkan dalam Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab, dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dengan demikian, UUD 1945 merupakan landasan normatif bagi pembangunan yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan salah satu tujuan bangsa dengan menggaris bawahi bahwa tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan manusia. Dengan demikian, IPM merupakan konsep pembangunan yang bermakna sebagai proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik sesuai dengan amanah konstitusi (Fretes, 2017).

Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi juga diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang menjadi kemajuan suatu Negara.

Keberhasilan suatu pembangunan manusia tidak lepas dari adanya campur tangan pemerintah atau kinerja pemerintah dalam menciptakan peraturan atau regulasi. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah memiliki peran dalam pembangunan manusia yaitu dengan cara melalui pengeluaran pemerintah sektor publik yaitu pada anggaran di bidang kesehatan untuk dapat meningkatkan angka harapan hidup maupun untuk menurunkan angka kematian. Pada bidang pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga dapat meningkatkan angka melek huruf. Kemudian pada pengeluaran pemerintah seperti belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk bisa meningkatkan pendapatan riil perkapita (Baeti, 2013).

Di Indonesia, dalam UU Nomor 32 Th. 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan penuh bagi masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan ^{sedikit} intervensi pemerintah pusat. Kebijakan itu dikenal dengan istilah Otonomi Daerah. World Bank (1997) dalam Khusaini (2006: 66) menyatakan bahwa pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa intervensi serta bantuan dari pemerintah pusat. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan dari Lain-lain pendapatan yang sah serta Dana Perimbangan.

Adapun Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dana Bagi Hasil adalah

dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pertiwi, 2018).

Dana perimbangan digunakan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Dana perimbangan yang berasal dari dana APBN merupakan dana untuk daerah yang ditujukan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU No. 32 Tahun 2004). Dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka menutupi kesenjangan fiskal daerah yang disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan dengan PAD nya. Penggunaan Dana Perimbangan secara umum sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan atau alokasinya, sehingga pemerintah daerah harus bijak dalam menggunakannya agar diperoleh hasil yang baik dalam meningkatkan pembangunan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Darmawan, 2013).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 belanja modal dapat berupa: (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja modal lainnya, dan (6) belanja modal Badan Layanan Umum (BLU). Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Prihastuti, 2018).

Todaro (2003) menyampaikan bahwa akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Menurut Sasana (2006) investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengalokasikan dana untuk berbagai proyek pembangunan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Investasi pemerintah daerah tersebut dirinci dalam belanja modal pemerintah daerah. Pada kenyataannya, realisasi belanja modal memiliki porsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan belanja pegawainya padahal belanja modal merupakan bagian dari rincian belanja langsung yang memiliki manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian (Maulana dan Bowo 2013).

Beberapa penelitian terdahulu tentang Indeks Pembangunan Manusia telah banyak dilakukan oleh peneliti antara lain Wiliantara dan Budiasih (2016), Harahap (2011), Sarkoro dan Zulfikar (2016), Fretes (2017), Prihastuti (2018), Sari dan Supadmi (2016), Mirza (2012), Tarumingkeng, Rumate dan Rotinsulu (2018), Maulana dan Bowo (2013), Monsef, Sameti dan Mojahednia (2011), Riviando, Agustin, Halmawati (2019), Hanantoko (2020), Widyawati (2020).

Terdapat *research gap* dari penelitian sebelumnya yaitu Fretes (2017), Wiliantara dan Budiasih (2016), Riviando, Agustin, Halmawati (2019), Hanantoko (2020), yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian Harahap (2011), Sarkoro dan Zulfikar (2016) Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Sari dan Supadmi (2016), Mirza (2012), Tarumingkeng, Rumate dan Rotinsulu (2018), Widyawati (2020), Hanantoko (2020) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian Prihastuti (2018) menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Maulana dan Bowo (2013) yang menyatakan bahwa Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Teknologi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian Monsef, Sameti dan Mojahednia (2011) menyatakan bahwa Teknologi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi dari penelitian Hanantoko (2020), Prihastuti (2018) dan Maulana dan Bowo (2013). Adanya *research gap* dari penelitian terdahulu dan menunjukkan perbedaan hasil yang terjadi pada berbagai penelitian terdahulu menunjukkan ketidak-konsistenan hasil penelitiannya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel Dana Bagi Hasil pada komponen Dana Perimbangan. dan pada variabel Pendidikan di fokuskan angka melek huruf usia 15-59 tahun. serta perbedaan objek dan tahun penelitian yaitu pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2018-2020.

2. METODE

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan berpedoman pada pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif yang berkeinginan untuk meneliti bagaimana keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Pendekatan kuantitatif merupakan tahapan penelitian yang dipakai untuk mencari kebenaran populasi atau sampel tertentu yang berguna untuk menguji apakah hipotesis yang dibuat sudah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

2.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 115) yang dimaksud populasi adalah “objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Menurut (Sugiyono, 2015:168) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2020.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari peneliti. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel seperti berikut ini:

- a. Pemerintah Provinsi di Indonesia yang laporan keuangannya telah diaudit oleh BPK.
- b. Pemerintah Provinsi di Indonesia yang data APBD nya telah masuk dalam website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Negara.
- c. Pemerintah Provinsi yang memiliki Data Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan dan Teknologi tahun 2018-2020 (data diperoleh dari BPS).

2.3 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode urutan 3 tahun (2018-2020) pemerintah Provinsi se-Indonesia, yakni Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal dan Pendidikan & Teknologi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut diperoleh dari website www.bps.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id.

2.4 Metode Analisis Data

Keseluruhan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software SPSS 26 version for windows*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tabel 1. Tabel Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T _{hitung}	Sig
Konstanta	29.430	6.674	.000
Dana Alokasi Umum	1.089E-6	2.170	.033
Dana Alokasi Khusus	-3.669E-7	-2.392	.019
Dana Bagi Hasil	-5.943E-7	-2.713	.008
Belanja Modal	5.968E-7	1.556	.123
Pendidikan	.169	3.660	.000
Teknologi	4.420	15.632	.000
R ² = 0,911		F _{hitung} =	75,015
Adjusted R ² = 0,830		Sig =	0,000

Model dari penelitian ini adalah:

$$IPM = 222 X1 - 225 X2 - 148 X3 + 106 X4 + 198 X5 + 876 X6 + e \quad (1)$$

Pengujian regresi digunakan pengujian dua sisi (*twotailed test*) dengan $\alpha = 5\%$ yang berarti bahwa tingkat keyakinan sebesar 95%. Hasil uji t dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa :

- Nilai t hitung untuk variabel DAU memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,170 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,033 < 0,05$. Dengan demikian maka H₁ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Nilai t hitung untuk variabel DAK memiliki nilai t_{hitung} sebesar - 2,392 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Dengan demikian maka H₂ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Nilai t hitung untuk variabel DBH memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2,713 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Dengan demikian maka H₃ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Nilai t hitung untuk variabel BM memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,556 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,123 > 0,05$. Dengan demikian maka H₄ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

- e. Nilai t hitung untuk variabel Pendidikan memiliki nilai t hitung sebesar 3,660 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka H5 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- f. Nilai t hitung untuk variabel Teknologi memiliki nilai t hitung sebesar 15,632 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka H6 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Teknologi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel IV.8 diketahui bahwa DAU memiliki nilai t hitung sebesar 2,170 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,033 < 0,05$. Dengan demikian maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisiensi β_2 sebesar 0,222 menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 22,2%. Dana Alokasi Umum digunakan untuk memenuhi alokasi dasar dalam suatu pemerintahan daerah, dimana alokasi dasar merupakan alokasi anggaran untuk belanja pegawai bukan belanja modal. Seharusnya Dana Alokasi Umum lebih dialokasikan untuk belanja modal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Riviando dkk (2019), Sembiring (2019) dan Hanantoko (2020), Sembiring (2019), Ramadhani & Utomo (2019) yang menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

3.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel IV.8 diketahui bahwa DAK memiliki nilai t hitung sebesar -2,392 dengan tingkat signifikansi sebesar $-0,019 < 0,05$. Dengan demikian maka H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisiensi β_2 sebesar -0,225 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia sebesar -22,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya dana alokasi khusus maka akan mengakibatkan menurunnya indeks pembangunan manusia. Adanya kenaikan IPM yang cukup signifikan dari peningkatan variabel DAK dapat dimaklumi karena DAK merupakan special grants yang penggunaannya sudah

ditentukan sebagai dana infrastruktur, yaitu belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Serupa dengan variabel DAU, pembahasan DAK juga tidak tepat jika dilakukan secara individual karena sifatnya sebagai dana pemerataan. Ada dua pertimbangan dalam alokasi DAK, yaitu DAK untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional dan DAK untuk daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal. Daerah dengan variabel DAK yang tinggi belum tentu mempunyai IPM yang tinggi demikian sebaliknya. Pembahasan secara individual harus melihat komposisi DAK serta kategori daerah bersangkutan. Secara umum daerah dengan rasio DAK yang rendah terdapat pada daerah maju yang mayoritas mempunyai IPM yang tinggi pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hanantoko (2020), Widyastuti (2020), Sembiring (2019), Ramadhani & Utomo (2019), Fretes (2017), Wiliantara dan Budiasih (2016) dan Rivianto dkk (2019), memperoleh hasil pengujian bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3.2.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel IV.8 diketahui bahwa DBH memiliki nilai t hitung sebesar -2,713 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Dengan demikian maka H₃ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisien β_1 sebesar -0,148 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia sebesar -14,8%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya dana bagi hasil maka akan mengakibatkan menurunnya indeks pembangunan manusia.

Hal ini disebabkan karena pengelolaan dan penggunaan DBH merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Namun terdapat beberapa komponen yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam hal penggunaan DBH untuk kesejahteraan masyarakat yang akan menyebabkan pengalokasian DBH kurang berdampak secara signifikan pada IPM. Peningkatan DBH seharusnya berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pemerintah daerah lebih banyak menggunakan DBH untuk mendanai kebutuhan masyarakat melalui alokasi belanja modal demi menunjang sarana dan prasarana publik yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhani & Utomo (2019), Hanantoko (2020), Widyastuti (2020) memperoleh hasil pengujian bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3.2.4 Pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel IV.8 diketahui bahwa BM memiliki nilai t hitung sebesar 1,556 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,123 > 0,05$. Dengan demikian maka H4 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisien β_2 sebesar -0,106 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia sebesar -0,106. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat belanja modal, maka Indeks Pembangunan Manusia juga semakin menurun. Hasil uji hipotesis pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap IPM dapat disimpulkan bahwa peningkatan infrastruktur publik dan penanaman modal pemerintah belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan antara belanja modal dengan Indeks Pembangunan Manusia sangat erat di mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (national character building) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mirza (2012), Sari dan Supadmi (2016), Taru mingkeng, Rumate, dan Rotinsulu (2018) memperoleh hasil pengujian bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Rivianto dkk (2019), Prihastuti (2018), Hariani dan Widyawati (2020) yang dalam penelitiannya bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3.2.5 Pengaruh Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel IV.8 diketahui bahwa variable PEND memiliki nilai t hitung sebesar 3,660 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka H5 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisien β_2 sebesar 0,198 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,198. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat pendidikan, maka Indeks Pembangunan Manusia juga semakin meningkat. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Karena pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar bangsa Indonesia mempunyai SDM yang ahli, terampil, kreatif

dan inovatif. Kualitas SDM sangat diperlukan jika Indonesia ingin menjadi negara yang berhasil menguasai ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrilisasi sehingga mampu menghadapi persaingan global.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Bowo (2013), Muliza dkk (2017), Widyastuti (2020) memperoleh hasil pengujian bahwa Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pengaruh Teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3.2.6 Pengaruh Teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel IV.8 diketahui bahwa variabel TEK memiliki nilai t hitung sebesar 15,632 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Teknologi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisiensi β_2 sebesar 0,876 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel teknologi terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,876. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat pendidikan, maka Indeks Pembangunan Manusia juga semakin meningkat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan padaakhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Monsef dkk (2011), Wiyastuti (2020) yang menunjukkan bahwa Teknologi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mengetahui pengaruh dana perimbangan (dana alokasi umum,dana alokasi khusus,dana bagi hasil), belanja modal, pendidikan dan teknologi terhadap indeks pembangunan manusia. maka dapat disimpulkan dari hasilanalisi regresi sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi se-Indonesia tahun 2018-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,008. Maka hipotesis ketiga diterima atau terdukung.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negative terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi se-Indonesia tahun 2018-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,033. Maka hipotesis kedua diterima atau terdukung.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi se-Indonesia tahun 2018-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,019. Maka hipotesis ketiga diterima atau terdukung.
- d. Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi se-Indonesia tahun 2018-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia diatas 0,05 yaitu sebesar 0,123. Maka hipotesis keempat ditolak atau tidak didukung.
- e. Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi se-Indonesia tahun 2018-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Maka hipotesis kelima diterima atau terdukung.
- f. Teknologi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi se-Indonesia tahun 2018-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi teknologi terhadap indeks pembangunan manusia dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Maka hipotesis kelima diterima atau terdukung.

Berikut adalah keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini:

- a. Tahun pengambilan sampel yang hanya 3 tahun yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020 sehingga tingkat generalisasinya kurang baik.
- b. Variabel independen (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja modal) dapat mengungkapkan 83% dari pengaruhnya terhadap variabel dependen (indeks pembangunan manusia) sehingga sisanya 17% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini.

Berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti :

- a. Periode waktu pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih di perpanjang untuk dapat mengetahui kecenderungan dalam jangka panjang.
- b. Disarankan Pemerintah wajib memberi alokasi anggaran pada sektor publik yaitu (pendidikan) yang langsung dapat dinikmati masyarakat sehingga akan mampu meningkatkan indeks pendidikan seperti pembebasan sumbangan pembiayaan pendidikan, pembebasan uang pangkal sekolah, dan fasilitas pendidikan yang langsung dinikmati

- masyarakat.
- c. Pemerintah daerah diharapkan melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari capaian IPM yang diperoleh.
 - d. Pada penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti faktor lain yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, misalnya kekayaan daerah, performa keuangan, kemandirian, opini dan kesesuaian kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rezha Hanantoko,(2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 , e-ISSN 2745-6366 Vol. 02, No. 1, Juni 2020,Jurnal Economie.
- Yuly Widyastuti (2020) Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sri Ramadhani dan Cahyo Utomo (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Dan Dana Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia , Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 1 Januari 2019 ISSN : 1412-5331.
- Adel Rivianto , Henri Agustin dan Halmawati (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri A, Februari 2019, Hal 1-17 ISSN : 2656-3649 (Online) <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>.
- Erika Apulina Sembiring (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara, 160. Accumulated Journal, Vol. 1 No. 2 July 2019 ISSN: 2656-4203.
- Anim Rahmayati & Imanda Firmantyas Putri Pertiwi (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia , Journal of Islamic Finance and Accounting Vol. 1 No. 1 Januari-Mei 2018 P-ISSN: 2615-1774 | E-ISSN: 2615-1782.
- Lailatul Mubasiroh Moh. Djazari,(2018), Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal di provinsi diy tahun 2010-2016 , Profita Kajian Ilmu Akuntansi, 2018, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/13826/13351>
- Mudrika Alamsyah Hasan & Muhammad Fajar Suryo Agung (2018) , Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 2011-2015, Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 2, April 2018 : 190 – 203, ISSN 2337-4314 .
- M.Irfan Pratama (2018), Analisis Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2016 ,Skripsi Universitas Islam Indonesia,2018.

- Prihastuti, Asepma Hygi. (2018). Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Riau. *Menara Ekonomi*, ISSN. Vol.IV No.1
- Sony Kristiyanto dan Sugeng Widodo (2017) , Analisis Efisiensi Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota Di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan , *JIEP-Vol. 17, No 1 Maret 2017* , ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851
- Muliza , T. Zulham , Chenny Seftarita (2017) Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh) , *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 3 Nomor 1, Maret*
- Fretes, P.N. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan ertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kcamatan Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri. Vol.2 No.2*
- Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016), Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014), *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1), 2016* .
- Ida Ayu Candra Yunita Sari dan Ni Luh Supadmi(2016) , Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia , ISSN: 2302-8556
- Williantara, Gede Ferdi dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. (2016). “Pengaruh PADDAAU, DAK, dan DBH pada IPM”. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3. Juni (2016): 2409-2438.*
- Darmawan, E. (2013). Pengaruh Dana Bagi Hasi (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya).
- Maulana, Ridwan dan Prasetyo Ari Bowo (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap IPM provinsi di Indonesia. *Journal of Economics and policy. Jejak 6 (2)*
- Denni Sulistio Mirza (2012), Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009), *EDAJ 1 (1) (2012) Economics Development Analysis Journal* , ISSN 2252-6560 <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj> .
- Mirza, Denni Silistio. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*
- Monsef, Abdolali, Majid Sameti, Mahsa Mojahednia. (2011). The Effect of Intellectual Property Rights and Information and Comunication Technology on Human Development Index in Developing Countries During 2005-2010. *Australian Journal of Bussines and Management Research. Vil.1 No.9*

Harahap, R.U. (2011). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota Propinsi Sumatra Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol.11 No.1. Maret 2011

Monsef, Abdolali, Majid Sameti, Mahsa Mojahednia. (2011). The Effect of Intellectual Property Rights and Information and Comunication Technology on Human Development Index in Developing Countries During 2005-2010. *Australian Journal of Bussines and Management Research*. Vil.1 No.9

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011, tentang Klasifikasi Anggaran.

www.djpk.depkeu.go.id. di unduh tanggal 30 Desember 2022.

www.bps.go.id. di unduh tanggal 31 Desember 2022.